

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dipaparkan penulis dibawah ini menjadi sebuah pegangan dalam melakukan penelitian pada PT PNM Mekaar Cabang Megaluh sehingga dapat menambahkan teori yang digunakan dalam mendalami penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemberian kredit.

Tabel 2.1

No	Judul, Peneliti, Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit Dana Tunai pada Perusahaan Pembiayaan (Studi kasus PT Nusa Ciptadana Finance Cabang Salatiga), Rizza Nur Alifa, (2013).	Komponen pengendalian internal terkait implementasi pengendalian intern atas pemberian kredit serta menganalisis kelemahan pengendalian internal yang terdapat pada implementasi pengendalian internal	Kualitatif	Pengendalian internal pemberian kredit pada PT Nusa Surya Ciptadana Finance Cabang Salatiga sudah cukup memadai. Adanya prosedur pemberian kredit, kebijakan pemberian kredit dan perusahaan ini telah menerapkan unsur-unsur pengendalian internal atas pemberian kreditnya, dan hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas, wewenang, dan praktek-praktek yang cukup sehat.
2	Analisis Penerapan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Perseorangan, Halim Perdana Putra at el	Prosedur Pemberian kredit tanpa agunan terkait penerapan pengendalian internal	Kualitatif	Masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas. Tetapi, secara keseluruhan penerapan pengendalian internal yang ada di BRI Unit Simomulyo sudah

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2.1

	(2017).			cukup baik. Dan saran utama bagi BRI Simomulyo sebaiknya pada struktur organisasi di BRI Unit Simomulyo memisahkan tugas di bagian kredit agar tidak terjadi perangkapan fungsi.
2	Analisis Penerapan Pengendalian Internal Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Pada Perseorangan, Halim Perdana Putra at el (2017).	Prosedur Pemberian kredit tanpa agunan terkait penerapan pengendalian internal	Kualitatif	Masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas. Tetapi, secara keseluruhan penerapan pengendalian internal yang ada di BRI Unit Simomulyo sudah cukup baik. Dan saran utama bagi BRI Simomulyo sebaiknya pada struktur organisasi di BRI Unit Simomulyo memisahkan tugas di bagian kredit agar tidak terjadi perangkapan fungsi.
3	Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang, Liza Amelia at el, (2017).	Pengendalian kredit terkait dalam menciptakan Bank yang sehat dan meminimalisir terjadinya kredit macet	Kualitatif	Berfokus pada investasi kredit produktif dan kredit modal kerja. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang menganut prinsip 5C dan 7P dan analisis atau penilaian aspek-aspek per aspek yang telah diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing pelanggan dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman. Pengendalian kredit juga dilakukan dengan pemeriksaan langsung di tempat usaha debitur, tindakan pencegahan atau

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2.1

				setelah tindakan dijalankan.
4	Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit Uang Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Kertosono-Nganjuk), Kokok Marinto at el (2015).	Sistem dan prosedur pemberian uang dan pengendalian internal yang telah diterapkan dalam menjalankan sistem dan prosedur pada KSU	Deskriptif	Sistem dan prosedur digunakan sudah cukup baik dan sesuai dengan unsure-unsur pengendalian intern, tetapi sistem permohonan kredit uang yang diajukan peminjam disarankan merupakan sistem yang rumit, sistem tersebut memang efektif namun tidak efisien waktu, karena pengerjaannya terlalu memakan waktu yang banyak.
5	Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Pada BRI KCP Boulevard Manado, Hesty Harun (2013).	Penerapan struktur pengendalian intern dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha	Deskriptif	Penerapan pengendalian intern kredit usaha sudah cukup efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsure-unsur pengendalian intern yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teori pengendalian intern
6	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pemberian Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa LPD Sudaji, Kadek Dian Sutrisna Giriama at el (2015).	Pemberian kredit terkait penerapan system pengendalian internl	Kualitatif	Sistem pengendalian internal penilaian kelayakan pemberian kredit pada LPD Sudaji sudah baik dan dikategorikan memadai. unsur-unsur dari sistem pengendalian internal juga sudah efektif.
7	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa	Pengendalian intern terhadap keputusan persetujuan pembiayaan, serta	Kualitatif	SPI yang diterapkan KJKS BMT ANDA Salatiga sangat efektif digunakan untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Hal ini dilihat dengan unsur dan

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2.1

	Keuangan Syariah KJKS BMT Anda Salatiga, Wini Arintasari(2013)	mengenai hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan persetujuan pembiayaan, kendala-kendala pembiayaan yang dihadapi dan penerapan SPI dalam mencegah risiko pembiayaan macet		komponen SPI yang dinilai baik dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai indikator terlaksananya SPI yang handal dan efektif. Hanya saja pembiayaan bermasalah sendiri disebabkan oleh pihak BMT ( <i>surveyor</i> ) yang kurang teliti dalam menganalisis/mensurvei nasabah dan juga BMT menerima nasabah yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak BMT tanpa melihat kelengkapan administrasi walaupun potensi pembiayaan bermasalahnya tinggi.
8	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun, Robin Gita Mandira at el (2014).	Unsur-unsur pengendalian internal terkait sistem pengendalian internal atas Pemberian kredit pada BUMDes.	Deskriptif Kualitatif	Unsur-unsur sistem pengendalian intern pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai dan tiap elemen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif
9	Sistem pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah , Nunik	Pemberian kredit usaha kecil menengah dalam menerapkan sistem	Kualitatif	Dalam pengendalian lingkungan, penilaian risiko, informasi dan komunikasi sudah memadai, sedangkan untuk system pengendalian internal

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2.1

	Dwi Astutik (2017)	pengendalian internal		masih belum memadai, kendala yang dialami yaitu debitur menggunakan jaminan milik orang lain, usahanya surut, antara jaminan dengan kredit lebih besar plafondnya
10	<i>Effectiveness Of the Internal Control System, Mrs.S.Kumuthinidevi (2016)</i>	<i>The Study on effectiveness of the internal control system in Private Bank was based on the independent variables; control environment, risk assessment, accounting, information and communication, control activities and self assessment.</i>	<i>qualitative ly</i>	<i>The Study on effectiveness of the internal control system in Private Bank was based on the independent variables; control environment, risk assessment, accounting, information and communication, control activities and self assessment. In the univariate analysis of data, control environment that is organizational structures, policies and practices for human resources, authority and responsibility of private bank is in moderate level of effectiveness.</i>

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang ditulis peneliti disini adalah uraian singkat teori-teori yang digunakan dalam membahas dan memecahkan masalah sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli dibawah ini.

### 2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (financial assets) maupun tagihan-tagihan (claims) yang dapat berupa saham (stocks) obligasi (bonds) dan pinjaman (loans), dibandingkan dengan aset non-keuangan (non-financial assets). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya pada surat-surat berharga. Selain itu juga lembaga keuangan menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan, antara lain : simpanan kredit, proteksi asuransi, program pension, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. (Mughtar, Rahmidani, & Siwi, 2016)

Menurut UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan menjelaskan lembaga keuangan pada dasarnya merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Sedangkan Menurut SK Menkeu RI no. 792 Th 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan.

Lembaga keuangan diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Dalam dunia keuangan lembaga keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk nasabahnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan

perbank dan lembaga keuangan non perbankan (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek)

Lembaga keuangan (*financial institution*) dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan (*financial assets*) maupun tagihan-tagihan (*claims*) yang dapat berupa saham (*stocks*), obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*), daripada berupa aktiva riil misalnya bangunan, perlengkapan (*equipment*) dan bahan baku. Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan)), diunduh pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 09.33 WIB.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum lembaga keuangan merupakan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya.

## **2.2.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Keuangan**

### **2.2.2.1 Fungsi Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan,

building society (sejenis koperasi di Inggris), credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan bisnis serupa. Pada umumnya lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dll). (Wiwoho, 2014)

Fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. (Wiwoho, 2014)

#### **2.2.2.2 Tujuan Lembaga Keuangan**

Menurut (Pengajarku, 2018) adapun tujuan lembaga keuangan ialah sebagai berikut:

1. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga agar dana masyarakat lebih aman.

2. Bank menyalurka kembali dana yang dikumpulkan tersebut untuk dipakai dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Bank memberikan bantuan modal berupa kredit kepada masyarakat maupun perusahaan untuk modal usaha.
4. Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga.
5. Koperasi memberikan jasa simpan-pinjam bagi para anggotanya supaya pemakai uang lebih produktif dan anggotanya terbebas dari rentenir.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan**

Di Indonesia lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yakni jenis lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank

#### **1. Lembaga Keuangan Bank**

Lembaga keuangan Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan Bank memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam dunia bisnis adalah lembaga keuangan perbankan. Institusi perbankan merupakan subsistem dari keberadaan lembaga keuangan (*financial instituton*).

Dalam buku (Imaniyati, 2010) Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan

nasional dengan sistem ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga”, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun baik secara konsep maupun implementasinya tetap berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam hukum bisnis syariah, penegasan adanya perbedaan diantara keduanya sangat diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui sebab halal-haramnya, serta akibat maslahat-mudharatnya.

Secara umum, kita mengenal berbagai jenis Bank yaitu terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 tahun 1998 jenis bank di Indonesia ada dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

#### 1. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi Bank.

#### 2. Bank Umum

Bank umum yaitu Bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalulintas pembayaran, sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat

adalah Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR yaitu lembaga keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. BPR ini adalah Bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan atau pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. (Bitar, 2019)

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- a. Jasa pemindahan uang (Transfer)
- b. Jasa penagihan (inkaso)
- c. Jasa kliring (Clearing)
- d. Jasa penjualan mata uang asing (Valas)
- e. Jasa safe Deposit Box
- f. Bank Card
- g. Bank draft
- h. Bank Garansi dan Refrensi Bank

- i. Serta jasa bank lainnya.

Maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan dilihat dari kemampuan bank dari segi pemodalannya, manajemen, serta fasilitas yang dimilikinya.

## 2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan.

Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara
2. Memberi kredit jangka menengah
3. Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara
4. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah
5. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye
6. Sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian
7. Melakukan usaha lain di bidang keuangan.

Menurut (Wiwoho, 2014) Lembaga keuangan bukan bank memiliki tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Sehingga pengertian lembaga keuangan bukan bank secara umum yaitu semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat.

Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia diantaranya perusahaan asuransi, perusahaan leasing, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan dana pensiun, perusahaan sewa guna, bursa efek, pegadaian, perusahaan modal ventura, dan lain-lain.

Lembaga keuangan bank maupun bukan bank merupakan sama-sama lembaga yang menyediakan jasa keuangan hanya saja perbedaannya dapat dilihat melalui kegiatan utama tersebut. Kegiatan dalam penghimpunan dana untuk Bank secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, dan deposito). Sedangkan lembaga keuangan bukan bank kegiatan dalam menghimpun dana hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, bisa juga dari pinjaman/kredit dari lembaga lain).

Lembaga-lembaga keuangan dalam suatu Negara memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kontribusi tetap untuk perekonomian Negara. Lembaga keuangan bukan bank hanya dapat melakukan salah satu kegiatan keuangan. Sedangkan lembaga keuangan bank memiliki kemampuan dalam berbagai bentuk dan kegiatan utama pada bidang keuangan.

#### **2.2.4 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan atau *credo* yaitu saya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang, untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan, menyatakan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Adapun pengertian kredit menurut beberapa para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut (Yulianto, 2016) “kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dengan ditangguhkan pada suatu jangka waktu tertentu yang telah disepakati.”
2. Menurut Kasmir (2012:113) bahwa “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.”
3. Menurut (Fitri, 2014) menyatakan bahwa pengertian kredit adalah “sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Sehingga dari beberapa pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa kredit adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan atau non perbankan dalam membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk menunjang perekonomian atau usaha dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur. Kredit pada umumnya diberikan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak, dimana pihak kreditur percaya bahwa debiturnya akan segera melunasi hutangnya, dan pihak debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada saat jatuh tempo.

## 2.2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

### 2.2.5.1 Tujuan Kredit

Di dalam kredit terdapat hal-hal yang perlu diketahui termasuk tujuan dari kredit itu sendiri. Secara ekonomi tujuan kredit yaitu untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya akan memberikan kredit jika betul – betul merasa yakin bahwa penerima kredit mampu atau mau mengembalikan kredit.

Menurut (Kasmir, 2017), tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan,
2. Membantu usaha dari nasabah,
3. Membantu pemerintah."

Penjelasan dari tujuan kredit adalah :

1. Mencari keuntungan

Tujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha darinasabah

Tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, seperti penerimaan

pajak, membuka kesempatan kerja, menghemat devisa negara, dan meningkatkan devisa negara.

#### **2.2.5.2 Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut :  
(Kasmir, Edisi Revisi 2014:89)

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan dana dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dana dari daerah lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh (debitur) untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- d. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas – pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

### **2.2.7 Jenis-Jenis Kredit**

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain : (Kasmir, Edisi Revisi 2014:90)

#### **a. Dilihat dari tujuan penggunaan**

##### **1. Kredit Investasi**

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contoh kredit investasi, misalnya : Untuk membangun pabrik atau membeli mesin – mesin untuk memproduksi.

##### **2. Kredit Modal Kerja**

Modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh kredit modal kerja, misalnya : Untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

#### **b. Dilihat dari segi tujuan kredit**

##### **1. Kredit konsumtif**

Kredit konsumtif biasanya diberikan secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya, kredit ini biasanya dipakai untuk membeli

rumah atau merenovasi rumah dan untuk membeli mobil.

## 2. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit ini biasanya dipakai untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan bahan tambang.

## 3. Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah yang besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

### **c. Dilihat dari segi jangka waktu**

1. Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi ataupun palawija.
2. Kredit Jangka Menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

**d. Dilihat dari segi sektor usaha**

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.
2. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan kepada sektor peternakan, untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.
4. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
5. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan sesuai profesi. Contohnya : dosen, guru.
6. Kredit perumahan, merupakan kredit yang hanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan untuk merenovasi rumah. Dengan adanya kredit ini calon debitur tidak merasa ragu lagi.

### **e. Dilihat Dari Segi Jaminan**

#### **1. Kredit Dengan Jaminan**

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang akan diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya adalah dengan adanya kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

#### **2. Kredit Tanpa Jaminan**

Kredit Tanpa Jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

### **2.2.8 Unsur-unsur Kredit**

Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal utama yang menciptakan adanya kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu pemberi kredit dan pihak penerima kredit untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh.

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, Edisi Revisi 2014:86)

#### **1. Kepercayaan.**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan

akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2. Kesepakatan.

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bunga.

### 2.2.9 Prinsip – prinsip penilaian kredit 5C dan 7P

Pemberian Kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C analisis (Kasmir, Edisi Revisi 2014:94), sebagai berikut :

- a. *Character*, sifat dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya.
- b. *Capital*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba.
- c. *Capacity*, untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.
- e. *Condition*, untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang sesuai sektor masing – masing.

Sedangkan, pemberian kredit kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 7P analisis (Kasmir, Edisi Revisi 2014:94), sebagai berikut :

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu

atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Perpose*, untuk memenuhi tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit.

f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*, yang bertujuan, untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi

#### **2.2.10 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut (Yulian, 2016) Prosedur pemberian kredit adalah tahap – tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif

atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum, sebagai berikut : (Kasmir, Edisi Revisi 2014:100)

1. Pengajuan berkas – berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi, antara lain :

a. Latar belakang perusahaan

Seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan.

b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak

diberikan kepada yang pemohonnya.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas – berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- 1) Akte notaris, Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau Yayasan.
- 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia (BI) adalah NPWP-nya.
  - a) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.
  - b) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
  - c) Foto kopi sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

- a. Current ratio
  - b. Acid test ratio
  - c. Inventory turnover
  - d. Sales to receivable ratio
  - e. Profit margin ratio
  - f. Return on net worth
  - g. Working capital
2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan pihak bank inginkan, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah sebenarnya.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan, kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kecocokkan dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya – biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit

Merupakan kegiatan lanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung
- b. Atau dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu :

- a. Sekaligus
- b. Secara bertahap

Secara umum proses atau prosedur pemberian kredit dalam suatu lembaga keuangan perbankan atau non perbankan merupakan hal pertama yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur adalah melakukan permohonan kredit. Tahap pertama dari pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan dengan lisan. Pada tahapan ini lembaga keuangan (*Account Officer*) berkenalan dengan calon debitur, terutama apabila calon debitur tersebut bukan nasabah bank.

Pada saat itu juga calon debitur mengajukan jumlah kredit yang ia ingin peroleh dari bank serta tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk dan fotocopy kartu keluarga sampai pada kesimpulan bahwa

permohonan tersebut tidak layak untuk proses lebih lanjut *Account Officer* akan menolak permohonan tersebut, umumnya penolakan ini dilakukan secara lisan. Bila permohonan tersebut dinilai layak untuk diproses, *Account Officer* akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan pemohon (calon debitur) untuk mengumpulkan data dan melakukan peninjauan agunan. Pada tahap ini *Account Officer (AO)* berusaha mengenal calon debitur dengan lebih baik dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengadakan analisis kredit. Beberapa data yang dikumpulkan calon debitur yang mempunyai usaha adalah:

- 1) Identitas calon debitur
- 2) Bidang usaha, lokasi, dan lamanya usaha.
- 3) Daftar supplier (seperti nama dan alamat) untuk usaha tersebut dan sistem pembeliannya, apakah pembelian dilakukan secara tunai (cash) atau secara kredit.
- 4) Daftar pelanggan (nama dan alamat) serta sistem penjualan yang diterapkan calon debitur, apakah penjualan secara tunai atau dilakukan secara kredit.
- 5) Data keuangan seperti omset, laba dan lain-lain.
- 6) Bila usaha yang akan dibiayai adalah usaha baru, *AO* perlu mengetahui rencana-rencana kerja dan calon debitur untuk usaha barunya seperti manajemen, rencana pemasarannya, rencana produksi, dan lain-lainnya.

### 2.2.11 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: keandalan pelaporan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. (Hadiati, 2010) .

Adapun pengertian pengendalian internal menurut beberapa para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut (Mulyadi, 2014), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut : “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.”
2. Menurut (Romney & Steinbart, 2014) mendefinisikan sebagai berikut : pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan

bagian integral dari kegiatan pengelolaan. pengendalian internal memberikan jaminan yang lengkap dan wajar untuk sulit dicapai. Selain sistem pengendalian intern memiliki keterbatasan, seperti kerentanan terhadap kesalahan sederhana, penilaian yang salah dan pengambilan keputusan, mengabaikan manajemen dan terjadinya kolusi.

3. Menurut (Krismiaji, 2010) Pengendalian intern (Internal control) adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Antara sebuah tujuan dengan tujuan lainnya seringkali bertentangan. Sebagai contoh, perusahaan menginginkan untuk melakukan perubahan yang cukup drastic dalam proses bisnis dengan melakukan perekayasaan ulang (reengineering) sehingga perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan lebih cepat serta memperbaiki efisiensi operasi. Namun jika hal ini dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi risiko dalam upaya melindungi atau menjaga aktiva dan diperlukan perubahan yang signifikan dalam kebijakan manajemen.
4. Menurut Widjadja (2012) “Pengendalian intern COSO merupakan proses yang dijalankan pada sebuah perusahaan oleh pemilik perusahaan, seorang manajer, dan pemilik tanggung jawab lainnya yang dirancang agar dapat menyediakan sebuah kepercayaan yang

sesuai dengan apa yang telah dicapai dari tiga kategori berikut ini yaitu keterandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dalam operasional, ketaatan kepada hukum dan peraturan atau undang-undang yang berlaku”.

5. Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), pengendalian internal adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh Dewan Direktur, Manajemen, dan Personel lainnya, yang didesain untuk memberikan jaminan yang masuk akal yang memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan dengan kategori efektif dan efisiensinya operasi, daya andal laporan keuangan, dan kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Sehingga berdasarkan definisi dari beberapa para ahli yang telah dikemukakan diatas, disini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses atau metode yang digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang ditujukan agar dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan serta tercapainya tujuan manajemen

Suatu perusahaan menyusun sistem pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam proses pencapaian tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong

adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau bahwa kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang dijadikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik harus mempunyai struktur pengendalian intern yang baik pula, yaitu harus mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas disini dimaksudkan bahwa struktur pengendalian intern suatu perusahaan terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan cukup kepastian akan sasaran dan tujuan perusahaan yang akan dicapai.

#### **2.2.12 Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut (Arintasari, 2013) tujuan pengendalian intern adalah menjamin manajemen perusahaan agar :

1. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai;
2. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya;
3. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan;
5. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.

Sedangkan beberapa tujuan pengendalian intern berdasarkan (Mulyadi, 2014)

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi dan operasi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **2.2.13 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal**

Unsur pokok sistem pengendalian internal menurut (Mulyadi, 2009, :163)

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Setiap perusahaan harus membuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. Dengan begitu, sistem otorisasi akan menjamin masukan yang bisa dipercaya bagi proses akuntansi.
- 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem

wewenang dan prosedur pencatatan yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diciptakan cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, dapat dilakukan dengan cara melakukan seleksi pada calon karyawan sehingga didapatkan karyawan yang (Arintasari, 2013) sesuai dengan tuntutan/persyaratan pekerjaan serta pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

#### **2.2.14 Komponen Sistem Pengendalian Internal**

Kerangka kerja pengendalian intern yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan A.S dikeluarkan oleh Committee of sponsoring organizations (COSO). Pengendalian internal didefinisikan sebagai sebuah proses karena pengendalian intern ini melekat dalam kegiatan operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi. Pengendalian internal memberikan jaminan yang layak (bukan jaminan absolut) karena kemungkinan terjadinya *human failure*, kolusi, dan *management override*. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengendalian intern yang dihasilkan oleh COSO memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut komponen model pengendalian internal:

## 1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan a) Meliputi atribut individu, seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi, b) Lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja mereka merupakan mesin penggerak organisasi dan merupakan fondasi untuk komponen lainnya. AICPA mengidentifikasi tujuh faktor penting untuk sebuah lingkungan pengendalian. Dan faktor-faktor tersebut akan didiskusikan secara spesifik dalam sesi tersendiri dengan pertimbangan faktor ini merupakan salah satu komponen pengendalian intern yang penting yang diidentifikasi oleh laporan COSO.

Lingkungan pengendalian intern terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian intern serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Tanpa adanya lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian intern yang efektif.

### a) Integritas dan Nilai Etika

Manajemen perlu menciptakan sebuah kultur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai etika, karena hal ini merupakan sesuatu yang penting. Perusahaan dapat menetapkan integritas sebagai sebuah prinsip dasar perusahaan dan secara pribadi

dan aktif melakukan sosialisasi sekaligus mempraktikannya. Sebagai contoh, manajemen puncak harus menjelaskan bahwa laporan yang jujur lebih penting dibandingkan laporan yang menguntungkan. Oleh karena itu, manajemen tidak boleh berasumsi bahwa setiap orang jujur. Selain itu, manajemen harus memberikan penghargaan bagi sebuah kejujuran dan demikian pula sebaliknya. Manajemen harus menyusun kebijakan yang jelas tentang perilaku jujur dan tidak jujur. Manajemen perlu menciptakan sebuah kultur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai etika. Visi misi tujuan suatu perusahaan harus diterapkan dengan baik agar tujuan perusahaan tercapai dengan baik.

b) **Komitmen kepada Kompetensi**

Komitmen perusahaan terhadap kompetensi yang ada agar pengendalian internal berjalan dengan baik. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan pengalaman yang diminta untuk pengembangan kompetensi.

c) **Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen**

Merupakan komponen utama lingkungan pengawasan adalah filosofi dan gaya operasi manajemen. Jika manajemen tidak terlalu memberikan perhatian terhadap pengendalian intern dan perilaku etik (ethical behavior) maka karyawan perusahaan tidak dapat diharapkan dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif.

Semakin bertanggungjawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, semakin besar kemungkinan para pegawai akan berperilaku secara bertanggungjawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Filosofi dan gaya operasi manajemen dapat diukur dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- 1) Apakah manajemen berani menghadapi risiko untuk mencapai tujuan, atau apakah manajemen menaksir risiko potensial dan menetapkan cara menanggulangi risiko sebelum melaksanakan aktivitasnya?
- 2) Apakah manajemen berupaya untuk mengubah (memanipulasi) ukuran kinerja, misalnya laba bersih, sehingga kinerja manajemen nampak baik?
- 3) Apakah manajemen menekan karyawan untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan cara apapun? Atau apakah karyawan harus berperilaku etik? Atau dengan kata lain apakah manajemen dapat memanfaatkan cara mencapai tujuan dengan menggunakan hasil akhirnya?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merefleksikan filosofi dan gaya operasi manajemen. Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya operasi manajemen, karyawan semakin bertanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi.

d) Struktur Organisasi (*Organizational Structure*)

Struktur organisasi sebuah perusahaan menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab, dan memberikan rerangka menyeluruh untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Aspek penting dalam struktur organisasi mencakup otoritas sentralisasi atau desentralisasi, wewenang penetapan tanggung jawab untuk tugas khusus bagi departemen atau individu karyawan, cara-cara alokasi tanggung jawab yang mempengaruhi persyaratan informasi manajemen, dan organisasi fungsi sistem informasi dan akuntansi. Sebuah struktur organisasi yang sangat kompleks atau tidak jelas dapat menimbulkan persoalan yang serius di masa mendatang.

Di lingkungan bisnis sekarang, telah terjadi perubahan yang sangat besar terhadap praktik manajemen dan organisasi perusahaan. Struktur organisasi hirarki yang berciri pada jenjang yang berlapis-lapis dengan komando seorang manajer pada setiap jenjang sudah amat jarang digunakan. Struktur organisasi semacam ini telah tergantikan oleh struktur organisasi yang lebih rata (*flat*) yang memiliki tim kerja mandiri yang terdiri atas bermacam-macam karyawan yang dulunya berada di berbagai departemen yang berbeda dan terpisah atau sering disebut dengan tim kerja lintas fungsi.

Dengan model semacam ini, ada penekanan pada perbaikan yang terus menerus, tidak seperti cara lama yang melakukan

pengkajian kinerja secara periodik. Perubahan semacam ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap struktur organisasi perusahaan dan pada sifat dan jenis pengendalian yang digunakan oleh perusahaan.

e) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

Komite ini bertanggungjawab untuk mengawasi struktur pengawasan intern perusahaan, proses pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Salah satu tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk melakukan kaji ulang independen terhadap tindakan manajer untuk kepentingan pemegang saham. Kaji ulang tersebut dimaksudkan sebagai pengecekan terhadap integritas manajemen dan meningkatkan kepercayaan publik.

f) Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab

Wewenang dan tanggung jawab biasanya diatur dan ditetapkan dalam uraian tugas, pelatihan karyawan, rencana kegiatan jadwal, dan anggaran. Salah satu hal yang penting adalah kode etik yang terkait dengan standar perilaku etis, praktik bisnis, dan perbedaan kepentingan. Alat yang penting untuk penetapan wewenang dan tanggung jawab yang biasanya dipakai dalam berbagai organisasi adalah pedoman prosedur dan kebijakan tertulis dalam sebuah buku pedoman. Buku pedoman ini bermanfaat sebagai

referensi (acuan) kerja para karyawan dan merupakan materi pelatihan yang bermanfaat bagi karyawan baru.

g) Praktik dan Kebijakan tentang Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan *reward*, pelatihan, *punishment*, penilaian, penggajian, dan promosi memiliki pengaruh penting terhadap kemampuan organisasi meminimumkan risiko pengawasan intern. Karyawan harus diangkat dan dipromosikan atas dasar kapasitas dan kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan jabatan. Program pelatihan harus diarahkan pada pengenalan karyawan baru terhadap tanggung jawab, kebijakan, organisasi, dan prosedur. Untuk mendorong loyalitas dan efisiensi kerja, manajemen perlu menetapkan kebijakan yang jelas tentang kondisi kerja, kompensasi, insentif, dan jenjang karir.

2. Penilaian Risiko

Menilai risiko merupakan komponen kedua dari pengendalian intern. Penilaian risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Risiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Risiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, yang termasuk didalam risiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam.

Risiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu didalam organisasi misalnya karyawan yang tidak terlatih, karyawan yang tidak memiliki motivasi, atau perubahan dalam tanggung jawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Menurut (Hery, 2013) pengertian aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut : “Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas.”

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2017) aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dalam mengatasi risiko pengendalian telah dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Hery, 2013) kebijakan dan prosedur tersebut terdiri atas :

#### a. Pemisahan tugas yang memadai

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada 2 bentuk yang paling umum dari

penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu : pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula, harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dengan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik (operasional).

Sesungguhnya, rasionalisasi dari pemisahan tugas adalah bahwa tugas/pekerjaan dari seorang karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya. Jadi, hasil pekerjaan seorang karyawan dapat diperiksa silang (*cross check*) kebenarannya oleh karyawan lainnya. Ketika seorang karyawan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan, biasanya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu, sangatlah penting kalau pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

b. Otorisasi yang tepat

Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Jika setiap orang dalam suatu organisasi dapat memperoleh ataupun mengeluarkan aset semau mereka maka akan terjadi kerusuhan besar.

c. Dokumentasi dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan merupakan objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan

mengendalikan aktiva. Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan dan memberikan tanda tangan ke dalam dokumen, orang yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumentasi atas transaksi seharusnya dibuat ketika transaksi terjadi.

d. Pengendalian fisik atas aset

Untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, aktiva dan catatan harus dilindungi. Jika tidak diamankan sebagaimana mestinya, aktiva akan dicuri, diselewengkan, atau disalahgunakan.

e. Pemeriksaan Independen atas kinerja

Kebanyakan sistem pengendalian intern memberikan pengecekan independen. Kebutuhan akan pengecekan independen muncul karena pengendalian internal cenderung berubah sepanjang waktu, kecuali sering dilakukan penelaahan. Personel sangat mungkin lupa atau tidak sengaja tidak mengikuti prosedur, atau mereka menjadi sembrono kecuali jika ada seseorang yang mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan mereka. Tanpa mempertimbangkan kualitas pengendalian, para personel dapat melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Komponen keempat dari model pengendalian intern adalah informasi dan komunikasi. Tujuan utama sebuah Sistem Informasi Akuntansi adalah mencatat, memproses, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi tentang sebuah organisasi. Dengan demikian, SIA mempunyai tujuan diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang valid/sah
2. Menggolongkan transaksi secara cepat
3. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneterinya
4. Mencatat transaksi dalam periode akuntansi yang tepat
5. Dan menyajikan transaksi dan informasi lainnya secara tepat dalam laporan keuangan

Berdasarkan tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang akuntan dalam menghasilkan informasi keuangan adalah:

- a. Mengakui transaksi akuntansi dan merekam data yang relevan
- b. Melaksanakan prosedur pengawasan, seperti editing dan verifikasi
- c. Mencatat transaksi dalam jurnal
- d. Memposting transaksi dalam rekening-rekening buku besar
- e. Dan menyusun laporan keuangan

Sedangkan menurut (Mulyadi, 2017) sistem informasi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan,

menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi, Komunikasi ini mencakup system pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

#### 5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan sesuai dengan perubahan kondisi. Pemantuan kinerja merupakan hal yang penting dalam pengawasan. Ada beberapa metode kunci (pokok) dalam melakukan pemantauan kinerja diantaranya:

1. Supervisi yang efektif
2. Pelaporan pertanggungjawaban,
3. Dan internal auditing

### 2.2.15 Jenis-jenis Sistem Pengendalian Intern

Jenis-jenis Sistem Pengendalian Intern Mulyadi (2014: 164) menyatakan bahwa jenis pengendalian intern adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengendalian intern akuntansi

Merupakan bagian dan sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern yang baik akan menjamin kekayaan perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

#### 2. Pengendalian intern administratif

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

#### 3. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

#### 4. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada menyelenggarakan rekening-rekening control dan mengadakan perhitungan kembali gaji karyawan. Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

### 2.2.16 Keterbatasan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal perusahaan pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aset perusahaan telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Faktor manusia adalah faktor yang sangat penting sekali dalam setiap pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebuah sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif oleh karena adanya karyawan yang kelelahan, ceroboh, atau bersikap acuh tak acuh. Demikian juga halnya dengan kolusi, dimana kolusi ini akan dapat secara signifikan mengurangi keefektifan sebuah sistem dan mengeliminasi proteksi yang ditawarkan dari pemisahan tugas (Hery, 2013)

Menurut **COSO (2013:9)** keterbatasan-keterbatasan pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam *Internal Control Integrated Framework* yaitu sebagai berikut:

*“The Framework recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words, even an effective system of internal control can experience a failure. Limitations may result from the:*

- 1) *Suitability of objectives established as a precondition to internal control.*
- 2) *Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject to bias.*
- 3) *Breakdowns that can occur because of human failures such as simple errors.*
- 4) *Ability of management to override internal control.*
- 5) *Ability of management, other personnel, and/or third parties to circumvent controls through collusion.*
- 6) *External events beyond the organization’s control.”*

Berdasarkan uraian COSO, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya. Komponen pengendalian internal tersebut merupakan variabel yang akan digunakan peneliti untuk meneliti mengenai pengendalian internal menurut COSO yang dikombinasikan dengan pemberian kredit pada PT PNM Mekaar Cabang Megaluh.

**Gambar 2.3**

